

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan.

Isu - isu lingkungan hidup dewasa ini semakin menguat, termasuk pada scope global, secara substantif merupakan suatu wacana korektif terhadap paradigma pembangunan (Developmentalism). Krisis lingkungan hidup yang semakin luas di Indonesia dewasa ini, disebabkan antara lain karena perencanaan pembangunan yang biasanya lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dibanding ekologi. Sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini kita seperti menuai bencana lingkungan. Banjir, longsor, kekeringan kebakaran hutan dan lahan, degradasi hutan dan keanekaragaman dan pencemaran sungai, laut dan udara datang silih berganti. Sebagai akibatnya biaya (Cost) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (benefit) ekonomi yang diperoleh.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011 - 2016), namun demikian pengelolaan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan, demikian pula upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan belum sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

Kedadaan ini diperparah lagi dengan kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat di prediksi sesuai prakiraan yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir diseluruh belahan dunia, disamping itu yang tak kalah pentingnya mengenai isu dunia tentang komitmen pengurangan emisi karbon akibat deforesitasi dan degradasi hutan dan lahan.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 - 2021, masih akan dihadapkan pada

permasalahan yang sama, khususnya pencemaran sampah khususnya dalam Ibukota Kabupaten/ Kecamatan, Pencemaran air, udara, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, sedangkan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya masih berada di bawah baku mutu, selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk hutan mangrove (bakau) dan aliran fungsi pohon terutama lahan gambut pertanian menjadi lahan-lahan perkebunan, juga merupakan salah satu faktor mempercepat menurunnya kualitas lingkungan baik di air, darat dan udara.

Persoalan lainnya adalah terjadi peningkatan fenomena perubahan iklim (Climate Change) apabila tidak dilakukan upaya secara sungguh untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan berakibat terjadinya pemanasan global. Target Indonesia sendiri dalam menurunkan GRK adalah sebesar 26% pada tahun 2020 merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti pelaksanaannya melalui berbagai program dan kegiatan tahun 2016 – 2021 melalui Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan lingkungan akan memiliki dampak negatif baik pada aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu perlu adanya upaya mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan, Krisis semata, tetapi merupakan permasalahan peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Berdasarkan identifikasi terhadap tugas dan pelayanan yang akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanannya sebagai berikut :

- a. Masih sedikitnya jumlah personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menguasai teknik - teknik pengendalian dampak lingkungan.
- b. Masih lemahnya kinerja personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- c. Masih Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas lingkungan Hidup kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Adapun faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut diatas dapat dibagi atas 2 (dua) faktor yaitu Internal dan External sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. Masih minimnya sarana dan prasarana kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ada.
- b. Rendahnya minat baca personil Dinas lingkungan Hidup Daerah terhadap peraturan perundang – undangan tentang lingkungan hidup.
- c. Relatif masih rendahnya motivasi, inovasi dan kreatifitas pada sebagian personil dalam rangka aplikasi peraturan perundang – undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Faktor External

- a. Masih rendahnya komitmen dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap lingkungan hidup.
- b. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui pelatihan/ bimtek

dan bantuan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

- c. Perlu peningkatan status penegakan hukum termasuk kelembagaannya terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkeaan dengan aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta visi, misi, tujuan dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan yang ditetapkan selama kurun waktu 2016 - 2021 yaitu :

“ Tewujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (Lima) misi pembangunan Kabupaten Tajung Jabung Barat 2016- 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui argoindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan Beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021, misi yang terkait dengan bidang lingkungan hidup adalah misi kedua yang berbunyi :

“ Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup ”

Dalam upaya mewujudkan misi ke 4 (empat) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan Wajib Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup .
2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan
4. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
5. Program peningkatan pengendalian polusi
6. Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Untuk mendukung visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati seperti tersebut diatas, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

1. Tugas pokok yaitu melaksanakan sebahagian urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Lingkungan Hidup.
2. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja bidang lingkungan hidup .
 - b. Penyiapan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup daerah.
 - c. Pelaksanaan semua program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mendukung Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat beberapa masalah pelayanan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya yakni :

1. Meningkatnya tuntutan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Masih minimnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
3. Pendanaan kegiatan yang belum sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup .

Dengan demikian maka faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat berpengaruh dalam pencapaian visi, dan misi Bupati dan Wakil Bupati antara lain :

1. Faktor Penghambat ;
 - a. Pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kurang efektif dan cenderung berorientasi keekonomian yang kurang memperdulikan kaidah dan norma serta etika lingkungan berpotensi merusak dan

mencemari sumber daya alam dan lingkungan hidup serta menurunnya kualitas ekosistem.

- b. Kurang berperannya masyarakat adat/ lokal dan terbaikannya kearifan lokal di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.

2. Faktor Pendorong

- a. Adanya komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan .
- b. Adanya tuntutan permintaan green productivity
- c. Adanya misi kepala daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup .
- d. Adanya kewenangan daerah melalui otonomi daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga (K/L)

Secara umum sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Sedangkan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

3.4. Telaahan Renstra Provinsi

Secara umum tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dalam Renstra Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jambi di Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan :

1. Tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup baik di air, udara dan tanah, sehingga masyarakat memperoleh Kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- b. Meningkatkan ketaatan hukum dibidang lingkungan.
- c. Merehabilitasi alam yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan .
- d. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sda dan lingkungan hidup kepada masyarakat guna mendukung perencanaan sda dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel.

2. Sasaran :

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diatas, Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jambi menetapkan sasaran yang akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Terkelolanya sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup dengan baik

- b. Terwujudnya kualitas sumber daya air, tanah dan udara sebagaimana diharapkan.
- c. Terwujudnya penataan hukum dibidang lingkungan hidup baik terhadap masyarakat akan arti pentingnya memelihara SDA dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Menyadari banyaknya permasalahan lingkungan hidup, baik yang berskala lokal, regional, ataupun nasional bahkan lintas negara, dan tidak cukup memadainya Instrument AMDAL yang hanya berorientasi pada skala proyek, kini telah dikembangkan satu instrument yang berskala regional sampai Internasional pada tataran strategis. Instrument ini kemudian dipopulerkan dengan istilah Strategic Environment Assessment (SEA), yang kemudian diterjemahkan sebagai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sebagaimana tahap inisiasi pada umumnya kegiatan yang terkait dengan pemikiran KLHS ini masih lebih dikonsentrasikan pada studi dan pengenalan dengan kata lain kegiatan -kegiatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai kegiatan KLHS seutuhnya sehingga dapat dikatakan masih "Nearly SEA".

Namun sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan penyelesaian masalah lingkungan hidup pada tataran regional dan strategis di Indonesia, maka instrument KLHS ini dituntut untuk segera menjadi acuan dasar dalam mengkaji kebutuhan, perumusan tujuan, dan strategi pembangunan nasional maupun Daerah. Tuntutan ini semakin kuat sejalan dengan UU SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang ada .

Sesuai dengan perannya masing-masing, maka KLH, Bappenas, dan Depdagri semakin Instentif bekerja untuk merumuskan KLHS ini sebagai satu instrument nasional dan regional. Bahkan KLHS ini telah diupayakan untuk menjadi pegangan utama dalam merumuskan setiap strategi pembangunan berikut monitoring dan evaluasinya, baik dalam

konteks kewilayahan maupun sektoral. Dengan demikian KLHS adalah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin agar tidak terjadi efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan, dipertimbangkan secara Inheren dalam kebijakan, rencana dan program.

Adapun peran KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah KLHS bisa menentukan Substansi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Bisa dimanfaatkan sebagai Instrument metodologis pelengkap (Komplementer) atau tambahan (Subplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi - fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan AMDAL dan atau instrument pengelolaan lingkungan lainnya, dan menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategi dan parsitipatif, kerja sama, lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan Wilayah.

Selanjutnya, tujuan KLHS dalam penataan ruang yaitu :

1. Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam Subtansi RTRW.
3. Memperbaharui mutu dan proses formulasi subtansi RTRW .
4. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi.
5. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW.
6. Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh.

7. Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah, dan ekosistem.

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah, sebagai produk dari rangkaian proses wilayah, menjadi mutlak dan strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung Lingkungan. Oleh karena itu perlu penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan guna untuk memperbaiki Kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur /proses dan metodologi / muatan perencanaan.

3.6. Penentuan Isu - Isu Strategis

Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara administrasi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang terletak dibagian Timur, dengan demikian permasalahan, pembangunan yang dihadapi Provinsi Jambi juga akan menjadi masalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga perlu dilakukan penanganan secara simultan melalui keterpaduan perencanaan pembangunan daerah.

Penentuan isu-isu strategis dibidang sumber daya alam, dan lingkungan hidup mengacu pada hasil analisis isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan dengan pertimbangan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan 5 (Lima) tahun terakhir (2016 - 2021) yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah kedepan yang sangat menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2016 - 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dilakukan beberapa permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu :

1. Permasalahan pokok yang dihadapi :

- a. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan SDA menipis.
- b. Masih adanya pembalakan liar (illegal logging), pengkonversian hutan menjadi lahan perkebunan dan lahan pemukiman, terjadinya kebakaran hutan yang telah mempercepat pengurangan sebagian besar hutan.
- c. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar, perambahan dan okupasi kawasan hutan, perburuan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi yang disertai pembakaran hutan.
- d. Terjadinya degradasi daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat kerusakan hutan dan sedimentasi yang tinggi menyebabkan kapasitas daya tampung sungai menurun.
- e. Maraknya pertambangan galian C (tanah urug) tidak disertai dengan upaya rehabilitasi fungsi lingkungan, hampir semua pelaku usaha galian C tidak melakukan rehabilitasi lingkungan setelah selesai kegiatan.
- f. Dalam pengelolaan penambangan terlihat tanggung jawab sosial dan ekonomi perusahaan pertambangan terhadap masyarakat disekitar lingkaran tambang sangat kurang.
- g. Terjadinya penurunan kualitas air akibat kegiatan rumah tangga, pertanian dan Industri, juga memerlukan upaya pengelolaan limbah cair secara terpadu antar sektor terkait.
- h. Salah satu kendala utama pembukaan lapangan minyak baru adalah adanya konflik atau ketidak selarasan fungsi lahan, terutama dengan fungsi kawasan

hutan konservasi dan lindung, selain itu kendala lain adalah keterbatasan permodalan nasional, sehingga ketergantungan terhadap investor asing masih cukup tinggi.

- i. Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas sumber daya manusia profesional dalam perusahaan teknologi tenaga-tenaga pertambangan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.
- j. Pemanfaatan tambang telah menyisakan permasalahan lingkungan. Reklamasi tambang belum dikelola secara ekologis dan ekonomis ,sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian Fungsi lingkungan hidup Fisik meliputi : Air, Udara, dan Tanah ,dan bentang alam atau pun Non Fisik seperti sosial
- k. Masih tingginya kawasan hutan berstatus ' openaccess' merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. Belum jelasnya tata batas kawasan hutan menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.
- l. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa.
- m. Meningkatnya ketinggian air pasang (rob) setiap tahunnya, menyebabkan terjadinya banjir rob di beberapa kawasan / daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Isu – isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan secara serius dan sungguh – sungguh dalam perencanaan pembangunan kedepan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang, dan mempertimbangkan isu – isu dan dinamika nasional dan regional. Adapun berbagai isu –

isu lingkungan hidup yang strategis yang menonjol di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.
- b. Kerusakan hutan kawasan dari hutan mangrove dipesisir akibat kegiatan perambahan hutan, pembalakan liar, (Illegal Logging), alih fungsi lahan dan pembukaan jalan oleh masyarakat, pemukiman penduduk di dalam kawasan.
- c. Terjadinya kerusakan lahan di kawasan pertambangan, perkebunan, pertanian dan kehutanan yang berakibat sering terjadi banjir pada musim hujan dan kebakaran hutan / lahan pada musim kemarau serta hilangnya flora dan fauna tertentu yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati sebagai akibat alih fungsi lahan, pembukaan lahan dan illegal logging.
- d. Menurunnya kemampuan daya dukung dan daya tampung sungai Pengabuan dan sungai Betara, dimana dua sungai tersebut merupakan sungai besar yang mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup.
- e. Penyempitan badan air sungai (anak sungai) yang ada di dalam Kota Kuala Tungkal akibat intervensi bangunan / rumah penduduk, serta menumpuknya sampah yang mendesak badan sungai.
- f. Diperkirakan banyak terjadi penyimpangan baku mutu lingkungan yang dilakukan sebagian besar industri, terutama baku mutu limbah yang harus dibuang ke sungai.